

Analisa Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Febrianti Novita^{1*}, Dewi Sutjahyani²

¹⁻²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: 1222200021@surel.untag-sby.ac.id^{1*}, dewisutjahyani@untag-sby.ac.id²

*Penulis korespondensi: 1222200021@surel.untag-sby.ac.id¹

Abstract. *Local government financial reports (LKPD) help ensure public accountability and are greatly influenced by the competency of civil servants and the implementation of the government's internal control system (SPIP). The purpose of this study is to analyze the competency levels of civil servants in the Regional Revenue and Expenditure Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency, the effectiveness of the implementation of SPIP, and the impact of these two factors on improving the quality of financial reporting. Using a descriptive qualitative approach, primary and secondary data were collected from accounting managers, data and information officers, and regional asset utilization managers. Miles and Huberman's interactive model was used to analyze the data. The results indicate that although the abilities of public officials are generally sufficient, it is essential to improve their proficiency with digital financial systems. Furthermore, while SPIP is being used, there is a need to enhance the consistency of procedures, monitoring, and use of technology. The study concludes that improving continuous training, optimizing financial applications, and reinforcing internal supervision are crucial to enhancing LKPD quality.*

Keywords: *BPKAD Regency Sidoarjo; Civil Servant Competencies; Financial Applications; Government Internal Control System; Quality of Financial Statements.*

Abstrak. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) membantu memastikan akuntabilitas publik dan sangat dipengaruhi oleh kompetensi PNS dan penerapan sistem pengendalian internal (SPIP) pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kompetensi PNS di lingkungan Badan Pendapatan dan Belanja Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, efektivitas pelaksanaan SPIP, dan dampak kedua faktor tersebut terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer dan sekunder dikumpulkan dari manajer akuntansi, petugas data dan informasi, dan manajer pemanfaatan aset daerah. Model interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kemampuan pejabat publik umumnya cukup, penting untuk meningkatkan kemahiran mereka dengan sistem keuangan digital. Selain itu, sementara SPIP digunakan, ada kebutuhan untuk meningkatkan konsistensi prosedur, pemantauan, dan penggunaan teknologi. Studi ini menyimpulkan bahwa meningkatkan pelatihan berkelanjutan, mengoptimalkan aplikasi keuangan, dan memperkuat pengawasan internal sangat penting untuk meningkatkan kualitas LKPD.

Kata kunci: Aplikasi Keuangan; BPKAD Regency Sidoarjo; Kompetensi PNS; Kualitas Laporan Keuangan; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Manajemen keuangan daerah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sehat, dan menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran publik. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah alat penting untuk menilai kemampuan mereka dalam menjalankan manajemen keuangan secara tepat dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi tidak hanya menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tetapi juga menjadi dasar bagi pengawasan publik dan pengambilan keputusan strategis. Yang penting di sini adalah adanya sistem pengendalian internal yang kuat untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang tepat disajikan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah yang berlaku, serta peran pegawai pemerintah daerah yang kompeten (Widya Lutfi Wibowo & Bambang Widarno, 2020).

Peristiwa yang terjadi di Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan menarik terkait masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, BPKAD Sidoarjo mengalami kesulitan mempertahankan konsistensi kualitas laporan keuangan agar terus menerima opini tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah yang sering mendapatkan opini WTP, masih terdapat catatan atas kelemahan sistem pengendalian internal, seperti keterlambatan pencatatan aset tetap, ketidaksesuaian data keuangan antar-organisasi perangkat daerah (OPD), serta ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas di bidang akuntansi pemerintahan. Ini membuktikan bahwa untuk memperbaiki pelaporan keuangan, diperlukan optimalisasi sistem pengendalian internal dan peningkatan kemampuan karyawan (Ashari et al., 2025).

Fenomena lainnya ialah ketimpangan pemahaman dan penerapan sistem keuangan daerah antar-unit kerja di lingkungan BPKAD. Beberapa aparatur masih belum memahami mengenai aplikasi keuangan berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah Instansi (SIMDA). Kurangnya pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan menyebabkan penggunaan aplikasi ini tidak optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam input data keuangan dan penyusunan laporan akhir. Selain itu, masih ditemukan praktik administratif yang dilakukan secara manual di tengah tuntutan digitalisasi, yang pada akhirnya menghambat efisiensi dan akurasi pelaporan (B & Astuti, 2024). Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalisme aparatur dengan kenyataan di lapangan, yang dapat berdampak pada penurunan kredibilitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan keadaan ini, berikut ini adalah tujuan penelitian ini: (1) Menganalisis tingkat kompetensi aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan dan penyusunan LKPD, (2) Mengevaluasi efektivitas SPIP di lingkungan BPKAD dalam mendukung transparansi dan akurasi pelaporan keuangan, dan (3) Menginterpretasikan sinergi antara kompetensi aparatur dan SPIP dalam mewujudkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi publik adalah bidang akuntansi yang digunakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dan daerah, dan sumber dananya berasal dari pendapatan publik.

Akuntabilitas, transparansi, dan penyediaan layanan publik adalah tujuan utamanya. Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik mencakup pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan demi kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Indonesia menjadi pedoman bagi standar akuntansi negara ini. Prinsip akuntabilitas, transparansi, konsistensi, relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman menentukan kualitas laporan keuangan sektor publik. Kriteria ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menggunakan informasi keuangan secara lebih efektif (Anas, M., Rr. Forijati, 2020).

Kompetensi Aparatur

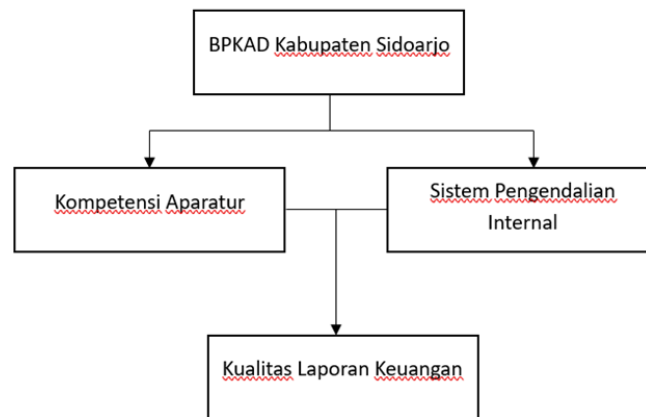
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kompetensi adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan oleh pegawai negeri untuk menjalankan tugasnya, serta merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja staf dalam pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi juga dipahami sebagai karakteristik mendasar individu yang memengaruhi efektivitas kinerja, termasuk kepribadian, karakter, kesadaran diri, pengetahuan, dan keterampilan (Spencer & Spencer, 1993). Dalam pemerintahan daerah, kompetensi aparatur tercermin dalam kemampuan melaksanakan administrasi keuangan secara akuntabel dan transparan, sebagai hasilnya, laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, relevan, dapat dipercaya, dan mudah dipahami. (Fauziyah, 2019).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah alat penting untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Para pemimpin dan seluruh karyawan menggunakan SPIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Untuk membentuk budaya pengelolaan di lembaga pemerintah, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan. Mekanisme ini mendeteksi ketidaksesuaian, memastikan prosedur dilakukan sesuai dengan kebijakan, dan menjaga keandalan laporan keuangan (Nurfadilla Syam & Ismail Keri, 2025). Selain itu, SPIP mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan audit internal yang efektif (Widya Lutfi Wibowo dan Bambang Widarno, diterbitkan pada tahun 2020).

Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah terkait pengelolaan sumber daya keuangan selama satu periode akuntansi. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan agar pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang terpercaya mengenai semua transaksi keuangan. Ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat menerapkannya dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual mengenali pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pada saat transaksi terjadi, sehingga penyusunan laporan keuangan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Widya Lutfi Wibowo & Bambang Widarno, 2020).



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk meneliti pengaruh kemampuan staf terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kabupaten Sidoarjo dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Data yang digunakan mencakup baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh langsung dari dokumen resmi seperti panduan pengendalian internal, laporan audit, dan laporan keuangan. Metode ekstraksi tujuan penelitian ditujukan kepada individu yang terlibat langsung dalam manajemen dan pelaporan keuangan. Ini termasuk manajer akuntansi, pengelola data dan informasi, serta pengelola pemanfaatan aset daerah. Pengumpulan data meliputi struktur organisasi, prosedur operasi standar (SOP), laporan keuangan, dan wawancara semi-terstruktur. Untuk menganalisis data, digunakan model Miles dan Huberman. Proses ini mencakup penyajian data, reduksi, dan

penarikan kesimpulan. Untuk memverifikasi data, dilakukan triangulasi dari berbagai sumber informasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

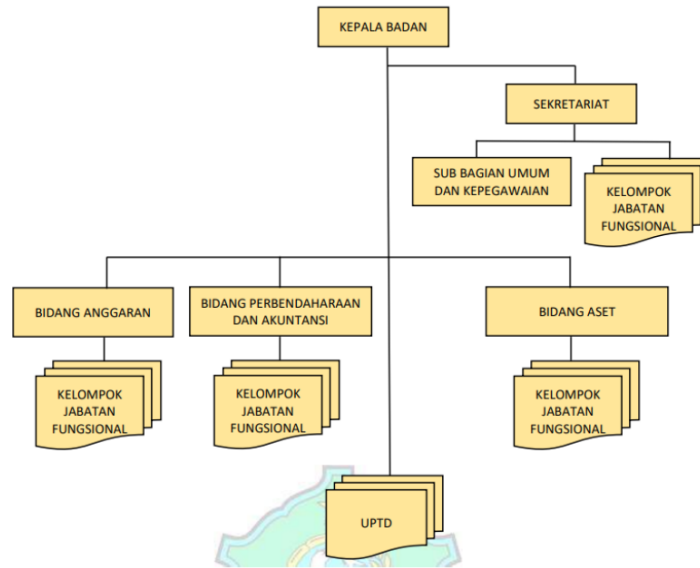
Profil Umum BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan organisasi lembaga daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan lembaga pengelola keuangan dan aset Kabupaten Sidoarjo. Menurut peraturan ini, lembaga keuangan dan pengelola aset di Kabupaten Sidoarjo wajib melakukan pengurusan administrasi tertentu yang terkait dengan bantuan keuangan.

Peraturan Gubernur Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan tentang posisi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi lembaga keuangan dan pengelolaan aset di Kabupaten Sidoarjo. Peran Biro Pengelolaan Aset Keuangan Kabupaten Sidoarjo adalah 'mendukung gubernur dalam pelaksanaan tugas administratif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk di bidang keuangan'. Kewajiban ini diberikan kepada lembaga keuangan dan pengelola aset di daerah setempat.

- a. Menyusun kebijakan dalam lingkup tanggung jawab sendiri
- b. Melaksanakan kebijakan dalam lingkup tersebut
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tersebut
- d. Menjalankan urusan administrasi lembaga
- e. Melaksanakan fungsi BUD, dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh gubernur.

Dengan struktur organisasi yang lengkap dan teratur, BPKAD dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Secara khusus, struktur organisasi ini membantu dalam upaya mendorong pemerintahan yang adil, transparan, dan efisien berbasis digital. BPKAD Kabupaten Sidoarjo memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi modern, berkat dukungan sumber daya manusia yang unggul dan pembagian tugas yang tepat.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

Sumber : Laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024.

Tingkat Kompetensi Aparatur dalam Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum, kompetensi aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah dinilai baik. Para pegawai telah memiliki pemahaman memadai terkait regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi kemampuan dasar dalam pengelolaan keuangan. Kompetensi regulatif ini dibentuk melalui pembiasaan dan sosialisasi rutin.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Pengelola Akuntansi, Pengelola Data dan Informasi, serta Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), ditemukan bahwa kompetensi aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo secara umum telah terbentuk dengan baik dari aspek pengetahuan regulatif dan pengalaman kerja. Informan Pengelola Akuntansi menyampaikan bahwa pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah menjadi kemampuan dasar aparatur karena didukung oleh sosialisasi rutin, bimbingan teknis, serta pengalaman penyusunan laporan keuangan tahunan secara berulang.

Namun demikian, temuan wawancara juga menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi pada aspek keterampilan teknis, khususnya dalam penguasaan sistem informasi keuangan berbasis digital seperti SIKSDA dan SIMDA. Pengelola Data dan Informasi mengungkapkan bahwa tidak seluruh aparatur memiliki tingkat penguasaan aplikasi yang sama, sehingga dalam praktiknya masih ditemukan ketergantungan pada beberapa pegawai tertentu yang dianggap lebih memahami sistem. Kondisi ini berdampak pada proses

rekonsiliasi data yang membutuhkan waktu lebih lama, terutama pada saat penyusunan laporan akhir tahun.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sari dan Putra (2020), yang menunjukkan bahwa kemampuan staf, seperti pengetahuan tentang peraturan dan SAP, sangat penting dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipercaya. Penelitian tersebut menekankan bahwa pengalaman kerja dan pelatihan berkelanjutan berperan penting dalam meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan ketepatan pelaporan.

Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung hasil studi Pratiwi (2021) yang mengungkapkan bahwa kendala utama aparatur pemerintah daerah saat ini bukan pada aspek pengetahuan regulatif, melainkan pada keterbatasan penguasaan sistem informasi keuangan berbasis digital. Hal ini memperkuat temuan wawancara dalam penelitian ini yang menunjukkan masih adanya ketergantungan pada aparatur tertentu dalam pengoperasian aplikasi keuangan daerah.

Temuan ini diperkuat oleh hasil dokumentasi dan observasi lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilaksanakan, penerapannya belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat proses administratif yang dilakukan secara manual. Dari sisi sikap kerja, hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur memiliki komitmen dan tanggung jawab yang baik terhadap penyelesaian laporan keuangan, terutama karena adanya tuntutan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian, kompetensi aparatur BPKAD dapat dikatakan cukup memadai, namun masih memerlukan penguatan berkelanjutan pada aspek literasi digital dan pemerataan keterampilan teknis.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam Menjaga Keandalan Laporan Keuangan Daerah

Menurut wawancara dengan pemberi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah resmi diterapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 membentuk sistem ini. Pihak yang memberikan informasi sebagai pengelola pemanfaatan BMD menyatakan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah, kegiatan pengelolaan seperti pemisahan tugas, pemeriksaan dokumen, dan pencocokan data aset sangat penting.

Berdasarkan temuan penerapan unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian dinilai cukup kuat, terutama melalui keberadaan SOP tertulis dan pengawasan berjenjang oleh pimpinan. Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa unsur penilaian risiko dan pemantauan masih belum berjalan secara optimal. Beberapa risiko, seperti

keterlambatan pencatatan aset dan perbedaan data antar-OPD, sering kali baru teridentifikasi menjelang akhir periode pelaporan.

Selain itu, informan Pengelola Data dan Informasi menyampaikan bahwa koordinasi antarbidang dan antar-OPD masih menjadi tantangan dalam implementasi SPIP. Perbedaan pemahaman prosedur dan keterbatasan komunikasi menyebabkan proses penyesuaian data memerlukan waktu tambahan. Penemuan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi sebagai bagian dari SPIP digital belum dioptimalkan sepenuhnya. Dengan demikian, efektivitas SPIP di BPKAD telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek monitoring berkelanjutan, manajemen risiko, dan integrasi sistem informasi.

Penelitian Wibowo dan Nugroho (2019) sejalan dengan hasil penerapan SPIP. Dalam penelitian mereka, terungkap bahwa di pemerintah daerah, SPIP biasanya dijalankan secara formal dengan menggunakan SOP dan pengawasan struktural, namun menghadapi tantangan dalam hal pemantauan berkelanjutan dan penilaian risiko. Penelitian Rahmawati (2020) juga menemukan bahwa lemahnya integrasi teknologi informasi dalam SPIP menyebabkan proses pengendalian internal belum berjalan optimal, khususnya dalam pengelolaan aset dan rekonsiliasi data antar-OPD. Hasil ini sejalan dengan temuan dari observasi dan wawancara di BPKAD Kabupaten Sidoarjo, dan penggunaan SPIP berbasis digital masih perlu terus diperkuat.

Hubungan antara Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian dokumen dan wawancara dalam studi ini menunjukkan bahwa kemampuan pegawai negeri dan efektivitas SPIP saling memperkuat dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aparatur yang memiliki pemahaman regulasi dan pengalaman kerja yang memadai mampu menjalankan prosedur pengendalian internal dengan lebih konsisten, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan penyajian laporan.

Informan Pengelola Akuntansi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan SPIP sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Aparatur yang memahami alur pengendalian, mulai dari otorisasi hingga rekonsiliasi, lebih mudah memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi teknis, terutama dalam penggunaan aplikasi keuangan, dapat menghambat efektivitas SPIP meskipun sistem dan prosedur telah tersedia.

Temuan ini menunjukkan bahwa SPIP berfungsi sebagai kerangka kerja pengendalian, sementara kompetensi aparatur menjadi faktor penentu dalam pelaksanaannya. Dengan kerjasama kedua belah pihak, laporan keuangan yang dapat diandalkan, relevan, dan dapat

dijelaskan dengan tanggung jawab akan disusun. Hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan Halim dan Kusufi (2018), yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh keberadaan sistem pengendalian internal dan kemampuan staf yang menjalankan sistem tersebut secara berkelanjutan. SPIP berfungsi sebagai kerangka kerja, sedangkan kompetensi aparatur menjadi faktor kunci keberhasilan implementasinya.

Penelitian Utami dan Handayani (2022) juga menegaskan bahwa sinergi antara kompetensi aparatur dan SPIP mampu meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi kompleksitas pelaporan berbasis akruar dan tuntutan transparansi publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo tidak hanya memerlukan penyempurnaan sistem dan regulasi, tetapi juga penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi dan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Kompetensi aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo secara umum telah memadai dalam pemahaman regulasi dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, namun masih memerlukan peningkatan signifikan dalam penguasaan sistem informasi keuangan digital agar selaras dengan tuntutan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah diterapkan secara formal, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala pada konsistensi prosedur, efektivitas monitoring, serta koordinasi antarunit, khususnya dalam penatausahaan dan pelaporan aset. Sinergi antara kompetensi aparatur dan efektivitas SPIP terbukti menjadi faktor kunci dalam mewujudkan laporan keuangan daerah yang akurat, andal, dan relevan, di mana kualitas LKPD sangat ditentukan oleh kemampuan pegawai dalam memahami regulasi, menjalankan prosedur secara konsisten, serta melakukan rekonsiliasi data secara tepat. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada literasi dan penguasaan aplikasi keuangan daerah, optimalisasi penerapan SPIP berbasis digital, serta penguatan mekanisme koordinasi internal dan antar-OPD guna meminimalkan keterlambatan dan ketidaksesuaian data keuangan dan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A., & Wahyuni, E. T. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 87–101. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>
- Ashari, A., Rahman, F., & Lestari, D. (2025). Evaluasi sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 13(1), 45–60.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. (2024). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Sidoarjo: BPKAD Kabupaten Sidoarjo.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, T., & Nugroho, R. (2022). Kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2451–2462. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.899>
- Kurniawan, D., & Fitriyah, F. K. (2020). Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 7(2), 156–167. <https://doi.org/10.17977/um004v7i22020p156>
- Nurfadilla, Syam, N., & Keri, I. (2025). Peran sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 11(1), 22–38.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratiwi, D. A. (2021). Tantangan kompetensi aparatur dalam implementasi sistem keuangan daerah berbasis digital. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(2), 115–128.
- Rahmawati, N. (2020). Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 4(1), 45–58.
- Sari, P. R., & Putra, A. Y. (2020). Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(1), 1–12.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, L., & Handayani, R. (2022). Sinergi kompetensi aparatur dan SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 10(2), 89–102.

- Wibowo, W. L., & Widarno, B. (2020). Sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(2), 130–142.
- Yuliani, N. L., & Agustina, L. (2023). Peran kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 33–47. <https://doi.org/10.32554/jap.v8i1.2147>